

ABSTRAK

Hasil studi yang dilakukan oleh IlmuOne Data menyatakan bahwa *e-commerce platform* di Indonesia mengalami rata-rata pertumbuhan sekitar 100 persen dan kenaikan tertinggi yaitu 135 persen pada periode Januari sampai dengan Juni 2017. Salah satu contoh potensi penerapan *smart contract* adalah dalam bisnis jual beli dalam *e-commerce*, mengingat teknologi *blockchain* kini berkembang pesat tidak hanya pada *cryptocurrency*, tetapi juga dalam layanan keuangan dan pembayaran dengan *smart contract*. Namun, belum ditemukan pengaturan mengenai *smart contract* dalam hukum kontrak dan hukum jual-beli di Indonesia. Kemudian, perlindungan hukum para pihak dalam *smart contract* perlu untuk ditelusuri guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam berkontrak. Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, peneliti menghubungkan karakteristik *smart contract* dengan peraturan perundang-undangan mengenai kontrak, informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Peneliti juga menelusuri peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen, serta asas-asas hukum kontrak yang dapat diterapkan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum para pihak *smart contract*. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *smart contract* merupakan bentuk kontrak yang sah dan dapat diterapkan di Indonesia dengan adanya peraturan mengenai kontrak, khususnya kontrak elektronik. Kemudian, penerapan Asas Proporsionalitas dan Asas Itikad Baik dapat mewujudkan *smart contract* yang berkeadilan dan menguntungkan para pihak.

Kata Kunci: *Smart Contract, Kontrak Elektronik, E-Commerce, Asas Proporsionalitas, Perlindungan Hukum*